

Inkonsistensi Kaidah dalam Buku Seri Penyuluhan Bahasa Indonesia dengan KBBI dan PUEBI

Rahmad Hidayat*, Mochammad Asyhar*

* Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP, Universitas Mataram

Posel: rahmad_ab@unram.ac.id

Abstrak: Penelitian ini hadir dalam rangka menguak inkonsistensi dalam Buku Seri Penyuluhan Bahasa Indonesia yang dipublikasikan oleh Badan Bahasa di laman resminya. Buku yang menjadi objek penelitian ini adalah buku *Seri Penyuluhan Bahasa Indonesia: Ejaan* dan buku *Seri Penyuluhan Bahasa Indonesia: Bentuk dan Pilihan Kata*. Data yang ditinjau kritis dalam objek penelitian ini adalah data yang menyimpang dari kaidah terbaru yang berlaku. Prosedur penelitian ini mengikuti dua prosedur analisis kontrastif yang di dalam pembahasannya juga membicarakan kesalahan berbahasa. Prosedur penelitiannya adalah pengidentifikasian masalah dan pendeskripsian masalah. Pengidentifikasian masalah dilakukan dengan Metode Simak dan Teknik Catat. Setiap ditemukan inkonsistensi, peneliti mencatat dan sekaligus mengidentifikasi bentuk inkonsistensi itu pada kartu data, termasuk dalam tahap ini adalah pengklasifikasian data. Pada tahapan pendeskripsian masalah, digunakan perbandingan antara penjelasan dan contoh yang ada di objek penelitian dengan kaidah yang tercantum di dalam KBBI dan PUEBI. Perbedaan itu kemudian dideskripsikan sehingga didapatkanlah uraian yang representatif mengenai inkonsistensi kaidah dalam objek penelitian. Simpulan penelitian menyatakan bahwa terdapat penjelasan dan data yang ada di dalam objek penelitian bertentangan dengan kaidah terbaru yang berlaku. Pertentangan atau inkonsistensi itu ditemukan dalam setiap bagian objek penelitian.

Kata-kata kunci: Inkonsistensi, Buku Seri Penyuluhan, Badan Bahasa

Abstract: *This research is present in order to uncover inconsistencies in the Indonesian Counseling Book Series published by Badan Bahasa on its official page. The books that are the object of this research are the Spelling Counseling Series, the Forms and Choice of Counseling Series, the Grammar Counseling Series, and the Sentence Counseling Series. The data that is critically reviewed in this research object is data that deviates from the latest applicable rules. The procedure of this research follows two language error analysis procedures. The research procedures namely problem identification and problem description. Identifying the problem is done using Simak Method and Catat Technique. Every time an inconsistency is found, the researcher notes and simultaneously identifies the form of the inconsistency on the data card. At the stage of describing the problem, a comparison is used between the explanation and examples in the object of research with the rules that applied in KBBI and PUEBI. The difference found then described in order to obtain a representative description of the inconsistencies in the object of research. The conclusion of the study stated that there are explanations and data contained in the object of research contrary to the latest rules that applied. These contradictions or inconsistencies are found in every part of the research object.*

Keywords: *Inconsistency, Counseling Book Series, Badan Bahasa*

PENDAHULUAN

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa merupakan lembaga yang diamanatkan untuk mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa Indonesia. Hal ini disebutkan pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (RI, 2009).

Sebagai lembaga yang menjaga dan mempertahankan martabat bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah merumuskan berbagai program. Salah satu programnya adalah pembinaan dan pemasyarakatan bahasa Indonesia. Pembinaan dan pemasyarakatan ini dilakukan melalui kegiatan pengajaran dan penyuluhan agar para pengguna bahasa Indonesia dapat ditingkatkan keterampilan, sikap, dan pengetahuannya mengenai bahasa Indonesia. Terkait hal itu, Badan Bahasa telah menerbitkan berbagai produk pengajaran dan penyuluhan yang dapat langsung diakses melalui laman resminya. Produk-produk tersebut dihatkan untuk menjadi bahan ajar dan bahan penyuluhan sekaligus sebagai pedoman bagi masyarakat luas dalam rangka penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Produk-produk pembinaan dan pemasyarakatan bahasa Indonesia berupa Pedoman Umum Pembentukan Istilah, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, Pembelajaran Bahasa dalam bentuk bahan ajar, Buku Seri Penyuluhan, serta kamus bahasa. Produk yang berupa pedoman berisi uraian preskriptif terkait bahasa Indonesia dan produk yang berupa bahan ajar berisi pengayaan bagi masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya menggunakan bahasa Indonesia.

Sebagai sebuah produk yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, produk-produk tersebut wajib mengutamakan penerapan kaidah dengan konsisten. Konsistensi penerapan kaidah merupakan perihal yang sensitif di tengah kenyataan masyarakat yang lebih banyak abai terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Sensitivitas tersebut berkaitan dengan kebutuhan masyarakat ketika menghadapi problema kebahasaan yang memerlukan penjelasan. Jika tidak konsisten sesuai kaidah dan pengecualian kaidah yang berlaku, kebingungan masyarakat akan terjadi. Oleh karena

itu, semua pedoman dan bahan ajar yang diedarkan wajib memenuhi standar pemeriksaan/penyuntingan yang ketat dan mengikuti kaidah yang berlaku.

Beberapa kenyataan abainya penutur bahasa Indonesia dalam menerapkan kaidah bahasanya tecermin dalam beberapa hasil penelitian. Penutur ini pun berasal dari berbagai kalangan, terutama kalangan akademis. Misalnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh (Suandi, 2015), (Rahmawati et al., 2015), (Herawati & Mulyaningsih, 2019), dan (Putri Wulan Dhari, 2020). Penelitian-penelitian ini menguraikan kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh dosen, dinas pemerintah, hingga kementerian. Dari kenyataan ini, dapat diasumsikan bahwa dalam kondisi pedoman/kaidah tersedia dan dapat diakses dengan mudah, berbagai kalangan masih abai dalam menerapkannya, apalagi dalam kondisi kaidah yang inkonsisten.

Dalam rangka mewujudkan konsistensi yang disebut di atas, penelitian ini berusaha mengidentifikasi salah satu bahan penyuluhan yang dikeluarkan oleh Badan Bahasa, yakni buku-buku yang terdaftar dalam Buku Seri Penyuluhan. Dalam beberapa bagian, terdapat inkonsistensi pelaksanaan kaidah kebahasaan yang berlaku dalam buku tersebut. Inkonsistensi tersebut berdasarkan kaidah yang tercantum di dalam buku-buku terbitan berikutnya dari lembaga bahasa tersebut, yakni Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, dan beberapa buku tata bahasa yang terkait. Dengan demikian, kaidah bahasa Indonesia yang dianalisis dari sumber data Buku Seri Penyuluhan dikonfirmasi kaidah-kaidah serupa yang termuat dalam beberapa buku yang disebutkan di atas.

Buku Seri Penyuluhan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Seri Penyuluhan Ejaan (Sriyanto, 2014), Seri Penyuluhan Bentuk dan Pilihan Kata (Mustakim, 2014), dan Seri Penyuluhan Tata Istilah (Qodratillah, 2016). Sepanjang pengamatan, belum ada penelitian mengenai tinjauan terhadap Buku Seri Penyuluhan. Namun demikian, beberapa tulisan terkait dengan variabel ini sudah ada seperti tinjauan kritis terhadap Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (Chaer, 2012). Penelitian semacam ini sangat perlu dilakukan demi menjaga konsistensi penerapan kaidah bahasa Indonesia dalam berbagai sumber referensi, khususnya buku-buku referensi yang diterbitkan dan diluncurkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan bahasa. Hasil penelitian semacam ini menjadi bahan rekomendasi, evaluasi, serta sistem kontrol bagi para pemangku kebijakan untuk terus berupaya menjaga martabat bahasa Indonesia.

LANDASAN TEORI

Penguraian inkonsistensi dalam penelitian ini lebih condong ke arah prinsip analisis kesalahan berbahasa dan analisis kontrastif. Kesalahan berbahasa yang dimaksud dalam konteks ini adalah ketidaksesuaian kenyataan berbahasa berdasarkan kaidah yang berlaku dalam bahasa tersebut (Suandi, 2008). Artinya, seluruh pembahasan dalam penelitian ini menstandarkan substansinya pada konsep bahasa Indonesia yang benar. Dalam pada itu, analisis kontrastif merupakan bidang yang dibentuk berdasarkan asumsi bahwa bahasa itu dapat dibandingkan untuk diidentifikasi perbedaannya. Selain menemukan perbedaan, analisis kontrastif juga berfungsi menemukan persamaan kedua bahasa yang diperbandingkan. Perbedaan dan persamaan itu selanjutnya akan menjadi uraian deskriptif kepada para pembelajar bahasa mengenai poin-poin perbedaan bahasa (Keshavarz, 2012). Dalam kesempatan ini, prinsip perbandingan dalam analisis kontrastiflah yang digunakan. Jika pada umumnya perbandingan dilakukan pada dua bahasa yang berbeda, pada penelitian ini, prinsip analisis kontrastif dipakai untuk membandingkan dua kaidah bahasa yang

diimplementasikan dalam sebuah bahasa yang sama. Hal ini selaras dengan yang dinyatakan oleh Willems et al (2003) bahwa untuk menghindari deskripsi yang terlalu sempurna dalam satu bahasa, para ahli bahasa yang tertarik pada penelitian terhadap satu bahasa akan menggunakan pisau analisis kontrastif untuk membedah bahasa tersebut.

Prosedur analisis kesalahan berbahasa dan prosedur analisis kontrastif hampir mirip secara teknis. Pada analisis kesalahan berbahasa, langkah kerjanya adalah mengumpulkan sampel kesalahan berbahasa, mengidentifikasi kesalahan, mendeskripsikan kesalahan, dan menjelaskan kesalahan (Dawud, 2015). Selanjutnya, prosedur dalam analisis kontrastif adalah seleksi item kebahasaan, deskripsi item kebahasaan, perbandingan sistem dan fitur kebahasaan, prediksi atas perbedaan fitur kebahasaan, dan verifikasi (Keshavarz, 2012). Kedua prosedur ini dapat saling beririsan dalam rangka menguraikan objek penelitian ini. Jika dibuat irisannya, prosedur analisis dalam penelitian ini menjadi proses pengidentifikasian masalah, proses perbandingan masalah, proses pendeskripsian masalah, proses penjelasan masalah, dan proses verifikasi masalah. Dengan demikian, kolaborasi dua bidang linguistik tersebut sangat membantu penerangjelasan objek penelitian ini.

Berikutnya, penelitian ini sangat terikat dengan kosep bahasa Indonesia yang benar. Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan pemakaian bahasa yang benar adalah pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah yang baku (Hasan, 2007). Kaidah-kaidah itu di antaranya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, serta Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan untuk menerangjelaskan objek penelitian adalah perbandingan data dengan ketentuan yang ada dalam kaidah tersebut.

Sebagian besar penerangjelasan data dalam penelitian ini menggunakan ketentuan yang terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya, disingkat KBBI V) yang digunakan adalah edisi kelima dalam versi luar jaringan (KBBI, 2019). Selanjutnya, pedoman ejaan yang digunakan adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (selanjutnya, disingkat PUEBI) berdasarkan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2015 (PUEBI, 2016). Penggunaan kaidah untuk menerangkan turunan kaidah berupa bahan ajar penyuluhan dimaksudkan untuk menguak inkonsistensi kaidah sebagaimana yang dihatjatkan oleh penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian dengan jenis ini berusaha mendeskripsikan dengan objektif sebuah fenomena yang terjadi pada saat tertentu. Karakteristik penelitian jenis ini adalah berfokus pada penelaahan objek secara ketat, cermat, dan teratur berdasarkan prosdur yang telah ditetapkan (Furchan, 2004). Data penelitian yang dianalisis dan dideskripsikan adalah beberapa kaidah bahasa Indonesia yang termuat dalam dua Buku Seri Penyuluhan Badan Bahasa, yakni Seri Penyuluhan Ejaan dan Seri Penyuluhan Bentuk dan Pilihan Kata.

Pada dasarnya, prosedur penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini mengikuti prosedur analisis kontrastif. Prosedur tersebut secara garis besar adalah pengumpulan data yang akan dianalisis, pengidentifikasian data tersebut, penginterpretasian data, dan pembahasan data. Selanjutnya, data-data yang sudah

dianalisis dibandingkan dengan data yang sama dalam buku-buku referensi lain yang juga diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Pada tahapan pengidentifikasian masalah, data dikumpulkan dengan menggunakan Metode Simak dan Teknik Catat (Mahsun, 2014). Pengidentifikasian dilakukan dengan menyimak isi Buku Seri Penyuluhan yang menjadi objek penelitian. Penyimakan dilakukan dengan cara membaca buku yang dijadikan sumber data penelitian sehingga didapatkan kaidah-kaidah yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah serupa yang termuat di dalam buku produk lembaga pemerintah yang sama. Setiap ditemukan penyimpangan kaidah, peneliti mencatat dan sekaligus mengidentifikasi bentuk kesalahan/simpangan itu. Tahapan ini dinamakan tahapan pengumpulan data. Berdasarkan paparan di atas, metode yang digunakan adalah metode simak tuturan tertulis dengan teknik catat.

Tahap selanjutnya adalah pembahasan data. Pada tahap ini data berupa kaidah bahasa Indonesia yang sudah diidentifikasi dibahas dengan cara memadankan mereka dengan kaidah-kaidah serupa yang ada dalam buku-buku lain produk Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Pemadanan ini dilakukan dengan cara membandingkan kaidah-kaidah yang ada dalam buku Seri Penyuluhan Bahasa Indonesia dengan KBBI V dan PUEBI. Langkah ini dilakukan untuk melihat perbedaan yang ada. Sehubungan dengan hal itu, dapat dikatakan bahwa pembahasan data dilakukan dengan metode padan intralingual dan teknik yang digunakan adalah teknik hubung-banding membedakan (Mahsun, 2014). Perbedaan itu kemudian dideskripsikan sehingga didapatkanlah penjelasan yang representatif mengenai tinjauan kritis terkait objek penelitian. Pendeskripsian ini selanjutnya disajikan dengan kata-kata biasa. Hal ini berarti penyajian hasil analisis data menggunakan metode informal (Mahsun, 2014).

PEMBAHASAN

Secara berturut-turut, pada bagian pembahasan dideskripsikan tinjauan mengenai isi Buku Seri Penyuluhan Ejaan dan Buku Seri Penyuluhan Bentuk dan Pilihan Kata. Terkait uraian pembahasan, ada dua hal yang perlu digarisbawahi. *Pertama*, perlu disampaikan bahwa rerata angka tahun publikasi buku yang diteliti adalah tahun 2014. Sementara itu, kaidah yang digunakan untuk meninjau isi buku, yakni PUEBI dan KBBI V masing-masing dipublikasikan pada tahun 2015 dan 2016. Terlepas dari perbedaan tahun penerbitan buku-buku tersebut, faktanya adalah buku-buku itu masih dijadikan acuan resmi terkait penggunaan bahasa Indonesia sampai artikel ini ditulis. Jadi, uraian pembahasan lebih banyak mengevaluasi substansi berdasarkan perbedaan kaidah-kaidah yang didokumentasikan dalam berbagai sumber referensi berbeda yang notabene diterbitkan oleh lembaga yang sama dan lembaga resmi pemerintah. *Kedua*, pada tahap pengidentifikasian data juga ditemukan kesalahan-kesalahan pengetikan. Kesalahan pengetikan yang dimaksud tetap masuk ke dalam pembahasan. Hal ini karena standar penyuntingan yang ada di Badan Bahasa seharusnya sangat ketat.

Buku Seri Penyuluhan Bahasa Indonesia: Ejaan

1. Nama ejaan yang berlaku saat ini

Persoalan pertama yang mendasar dalam buku ini adalah pernyataan bahwa pedoman ejaan yang berlaku saat ini adalah Pedoman Umum Ejaan Yang Disempurnakan (hal. 7). Padahal, sejak tahun 2015 dengan diberlakukannya Permendikbud Nomor 50 Tahun 2015, pedoman ejaan yang berlaku adalah PUEBI.

Perubahan dari PUEYD ke PUEBI memang tidak terlalu signifikan atau total, tetapi pada bagian tertentu, ada ditemukan penjelasan dalam buku ini yang tidak sesuai dengan pedoman terbaru yang berlaku saat ini.

Meskipun sederhana, pernyataan semacam ini cukup sensitif karena buku ini dapat diakses secara terbuka oleh khalayak. Apalagi, pada kenyataannya, nama Pedoman Umum Ejaan Yang Disempurnakan sudah tertanam dalam di benak para penutur bahasa Indonesia di berbagai kalangan. Dalam proses perkuliahan misalnya, sebagian besar mahasiswa akan menjawab EYD sebagai ejaan yang berlaku saat ini. Hanya segelintir mahasiswa saja yang mampu menjawab PUEBI. Oleh karena itu, pembaruan buku ini sudah selayaknya dilakukan demi menjaga konsistensi kaidah bahasa Indonesia.

2. Penulisan kutipan

Pada halaman 6 terdapat penulisan kutipan berupa (KBBI, 2008:353). Penulisan kutipan semacam ini terdapat satu-satunya di dalam buku ini. Yang patut disoroti adalah penulisan nomor halaman setelah titik dua yang tanpa disertai jarak spasi. Padahal, dalam aturan penulisan tanda titik dua di PUEBI dan di setiap contohnya, semua konstituen yang ada di setelah tanda titik dua diberi jarak spasi. Yang lebih menarik adalah kutipan tersebut merupakan kutipan satu-satunya yang ada di dalam buku ini. Kutipan tersebut juga tanpa dilengkapi dengan daftar pustaka sebagaimana layaknya pertanggungjawaban sebuah kutipan. Pada Buku Seri Penyuluhan yang lain, bahkan ditemukan kehadiran daftar pustaka tanpa adanya kutipan dan sumber kutipan yang jelas di dalam badan naskah (periksa Sriyanto (2014), Mustakim (2014), dan Sasangka (2014)).

Persoalan semacam ini tidak bisa dianggap sepele karena dapat menjadi acuan para penutur bahasa Indonesia dalam kegiatan tulis-menulis. Mahasiswa yang bergelut di dunia akademik misalnya, masih tidak konsisten dalam penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka. Pada kenyataannya, dalam tulisan, kutipan tidak ditulis sumbernya. Sementara itu, pada bagian daftar pustaka, sumber kutipan tersebut dituliskan. Begitu pula sebaliknya, penulisan sumber dilakukan pada daftar pustaka, sedangkan sumber kutipan tidak terdapat dalam badan naskah. Oleh karena itu, persoalan ini penting sekali untuk dicermati karena posisi strategis buku ini sebagai suluh bagi masyarakat.

3. Kata *asbabun nuzul* digolongkan bukan kata dalam bahasa Indonesia

Kata *asbabun nuzul* (tulisan disesuaikan dengan yang tertera di buku) pada halaman 13 dikatakan belum menjadi kosakata bahasa Indonesia. Dalam keterangannya, kata ini merupakan kata dalam bahasa Arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata ini disandingkan dengan beberapa kata lainnya, yakni *mad 'iwad*, *mad tabi'i*, *idgam bigunnah*, *da'wah bilisan*, dan *akhlakul karimah*.

Berdasarkan KBBI V, kata *asbabun nuzul* telah terserap dan termasuk ke dalam bahasa Indonesia dengan penulisan *asbabunnuzul*. Dalam KBBI V, kata ini bermakna “peristiwa, perkataan, atau perbuatan yang terjadi pada masa tertentu yang melatarbelakangi atau menjadi penyebab turunnya ayat Alquran”. Sementara itu, kata-kata lain yang serangkaian dengannya dalam buku tersebut diakui belum terserap ke dalam bahasa Indonesia karena tidak terdapat dalam KBBI V.

4. Penulisan *assālamu‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh*

Ucapan salam *assālamu‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh* dipersoalkan dalam buku ini karena bukan termasuk ke dalam bahasa Indonesia meskipun penulisannya dengan huruf latin (hal. 14—15). Karena bukan kosakata bahasa Indonesia, penulisan istilah tersebut menggunakan tanda apostrof dan menggunakan format miring. Tulisan salam dalam format lengkap seperti itu memang tidak terdapat di dalam KBBI V. Namun, tulisan salam dengan format lebih pendek yakni *asalamualaikum* telah menjadi bagian kosakata bahasa Indonesia.

Kata *asalamualaikum* dalam KBBI V memiliki makna “keselamatan (kesejahteraan, kedamaian) untukmu (biasanya diucapkan pada awal dan akhir pidato, saat bertemu dengan seseorang, dan sebagainya). Penulisan salam yang baku dalam bahasa Indonesia ini masih jarang diketahui oleh khalayak penutur bahasa Indonesia. Orang-orang masih menulis salam dengan format sebagaimana yang tertera dalam buku yang menjadi objek penelitian ini. Salam ditulis dengan dua huruf *s* dan tanda apostrof untuk merepresentasikan bunyi/huruf *ain* dalam bahasa Arab. Perubahan dalam bentuk penyesuaian ejaan semacam ini perlu disorot agar para penutur bahasa Indonesia sadar bahwa ucapan salam sudah menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia.

Di pihak lain, terdapat persoalan yang perlu dicermati terkait penyesuaian ejaan atas ucapan salam serapan dari bahasa Arab di atas. Penulisan huruf *s* ganda dan tanda petik tunggal atau tanda apostrof pada ungkapan *assalamu‘alaikum* menjadi *s* tunggal dan tanpa tanda apostrof, *asalamualaikum*, dikhawatirkan akan mengubah makna ucapan itu. Hal itu mengingat sistem tata bahasa dan sistem bunyi bahasa Arab berbeda dengan sistem yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab huruf ganda semacam *ss* itu untuk menandai *tasjīd* dan tanda apostrof dipakai untuk membedakan penulisan alif (ا) dan ‘ain (ع) yang keduanya dibedakan dengan bunyi glotal di depan. Penyesuaian pelafalan seperti itu dikhawatirkan akan mengubah makna karena salah satu prinsip dalam bahasa adalah setiap perubahan bentuk, baik itu segmental maupun suprasegmental, akan mengubah makna. Sementara itu, ungkapan salam seperti di atas bagi umat Islam tidak hanya sekedar berfungsi pragmatis, tetapi juga sebagai doa untuk orang yang diberi salam. Oleh karena itu, penyesuaian ejaan semacam ini perlu banyak pertimbangan yang tidak hanya lingual, tetapi juga ekstralingual.

5. Kesalahan penyebutan jumlah konsonan dan vokal dalam bahasa Indonesia

Pada halaman 16, buku ini menerangkan perbedaan jenis huruf dalam bahasa Indonesia. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan antara huruf konsonan dan huruf vokal. Dalam buku tersebut dikatakan bahwa huruf konsonan terdiri atas 26 huruf dan huruf vokal terdiri atas 5 huruf. Padahal, jumlah huruf yang ada dalam bahasa Indonesia secara keseluruhan adalah 26 huruf sebagaimana jumlah huruf konsonan yang disebutkan pada buku tersebut. Jadi, keterangan yang seharusnya muncul adalah huruf dalam bahasa Indonesia berjumlah 26 huruf. Huruf tersebut terdiri atas huruf konsonan yang berjumlah 21 huruf dan huruf vokal yang berjumlah 5 huruf.

Perbedaan ini lebih disebabkan ketumpangtindihan pemahaman antara kaidah fonologi dan kaidah ortografi. Secara fonologis bahasa Indonesia memang memiliki 26 bunyi konsonan dan 5 bunyi vokal. Akan tetapi, secara ortografis bunyi-bunyi bahasa Indonesia tersebut dilambangkan dengan 21 huruf yang melambangkan konsonan dan 5 huruf yang menjadi simbol bunyi vokal dalam ragam tulisan.

6. Jumlah Diftong Bahasa Indonesia

Diftong merupakan deretan bunyi vokal yang berada dalam satu suku kata. Sesuai dengan pedoman ejaan yang dianut dalam buku ini, jumlah diftong yang disebutkan terdiri atas tiga buah, yakni diftong *ai*, *au*, dan *oi*. Dalam pedoman ejaan yang terbaru, jumlah diftong bertambah satu buah, yakni diftong *ei* sehingga secara keseluruhan, diftong dalam bahasa Indonesia yang diakui saat ini berjumlah empat. Contoh-contoh diftong dalam pedoman ejaan yang terbaru adalah sebagai berikut. Diftong *ai* pada posisi awal seperti *aileron*, pada posisi tengah seperti *balairung*, dan pada posisi akhir seperti *pandai*. Diftong *au* pada posisi awal seperti *autodidak*, pada posisi tengah seperti *taufik*, dan pada posisi akhir seperti *harimau*. Diftong *ei* pada posisi awal seperti *eigendom*, pada posisi tengah seperti *geiser*, dan pada posisi akhir seperti *survei*. Selanjutnya, diftong *oi* yang distribusinya hanya berada di tengah dan di akhir. Distribusi diftong ini pada posisi tengah seperti kata *boikot* dan pada posisi akhir seperti kata *amboi*.

7. Penulisan *terdiri dari*

Pada halaman 57, ditemukan penulisan pasangan kata *terdiri* dengan kata *dari*. Padahal, pasangan kata *terdiri* adalah kata *atas*. Pada kenyataannya, banyak orang menganggap hal ini sebagai persoalan yang sepele. Para penulis dengan bebas menggunakan pasangan mana pun dalam tulisannya. Jika merujuk ke KBBI V, makna kata *terdiri* dalam konteks ini terdapat pada makna ketiga dengan makna 'terjadi'. Pada contoh kalimat di makna ketiga ini berbunyi *Para penyandera itu - atas lima orang*. Hal ini berarti pasangan kata *terdiri* adalah kata *atas*.

Kesatuan makna dari dua kata tersebut menjadi apa yang terdapat di sebelah kiri kata *terdiri* adalah terjadi atas apa yang terdapat di sebelah kanan kata tersebut bersama kata *atas*. Oleh sebab itu, pemakaian kata *terdiri* dalam bahasa Indonesia selayaknya dipasangkan dengan kata *atas*. Hal ini sejalan dengan pernyataan Buku Seri Penyuluhan Bentuk dan Pilihan Kata yang menyatakan bahwa pasangan *terdiri* dan *atas* merupakan bentuk ungkapan yang idiomatis. Ungkapan idiomatis dalam hal ini berarti pasangan tersebut telah dianggap sebagai satu kesatuan (lihat Seri Penyuluhan: Bentuk dan Pilihan Kata, hal. 77—78).

Buku Seri Penyuluhan Bahasa Indonesia: Bentuk dan Pilihan Kata

1. Kata bentukan *pengrajin*

Kata bentukan *pengrajin* dalam buku ini disejajarkan dengan kata bentukan *pengrusakan*. Kedua kata ini dianggap sebagai bentuk jadian yang tidak tepat dalam bahasa Indonesia (hal. 15—16). Secara morfofonemis, pembentukan kata dengan pelekatan prefiks {*peng-*} pada kata dasar yang diawali oleh fonem /r/ terealisasi menjadi (*pe-*). Dengan demikian, bentuk jadian *pengrusakan* dan *pengrajin* sejatinya tidak berterima dalam bahasa Indonesia. Bentuk yang berterima adalah *perusakan* dan *perajin*.

Berdasarkan teori morfofonemik, penjelasan dan vonis buku ini benar. Namun, bentuk *pengrajin* yang tidak berterima secara teoretis, ternyata terdapat dalam KBBI V dengan status bentuk turunan yang berterima dari kata dasar *rajin*. Kenyataan ini berkonsekuensi dua hal, yakni KBBI tidak konsisten atau kaidah yang memiliki

pengecualian. Diakui bahwa dalam beberapa kasus data, KBBI V mengandung data yang tidak konsisten jika dibenturkan dengan kaidah. Inkonsistensi ini ada yang dapat diterangkan sebagai pengecualian dari kaidah dan ada yang dapat diterangkan kaidahnya.

Dengan berdasar pada KBBI V merupakan kaidah primer dan buku yang menjadi objek penelitian ini adalah kaidah sekunder atau turunan, vonis KBBI V-lah yang seharusnya digunakan. Dengan demikian, penjelasan dalam buku ini perlu ditambahkan dari sudut pandang yang lebih luas agar pembaca dapat mengerti kenyataan kaidah bahasa. Perihal semacam ini selaras dengan bentuk *pertapa* (hal. 20). Dalam KBBI V, bentuk *pertapa* dan bentuk *petapa* keduanya berterima. Kedua bentuk tersebut merupakan turunan yang berterima dari kata dasar *tapa*. Jika mencari makna *pertapa*, *petapa* muncul. Begitu pula dengan bentuk *pengrajin* di atas yang maknanya diarahkan ke bentuk *perajin*.

2. Perihal *rayonisasi* dan *neonisasi*

Pada halaman 28, buku ini menerangkan soal *-isasi* yang bukan merupakan imbuhan dalam bahasa Indonesia. Pernyataan ini benar karena KBBI V juga mengamini hal tersebut. Bentuk *-isasi* tidak ditemukan dalam KBBI V karena bentuk ini bukan bentuk yang terpisah dari kata yang mengawalinya. Misalnya, bentuk *normalisasi* bukan terbentuk dari kata *normal* dan imbuhan *-isasi*, melainkan terserap secara utuh ke dalam bahasa Indonesia. Persoalan yang sering muncul dari *-isasi* ini adalah anggapan para penutur bahasa Indonesia bahwa *-isasi* merupakan imbuhan dalam bahasa Indonesia. Akibatnya, muncullah kasus-kasus semacam *vickynisasi* yang menganggap semua kata dasar dapat diimbuhkan *-isasi* dengan tambahan makna proses.

Bentuk *rayonisasi* dan *neonisasi* oleh buku ini termasuk ke dalam kasus anggapan penutur bahasa Indonesia itu. Kata lain semacam ini yang disebutkan dalam buku tersebut seperti *turinisasi*, *lelenisasi*, *lamtoronisasi*, *hibridanisasi*, dan *pompanisasi*. Namun, yang menjadi sorotan di sini adalah ternyata, bentuk *rayonisasi* merupakan bentuk yang berterima dalam bahasa Indonesia karena bentuk tersebut terdapat dalam KBBI V. Sementara itu, bentuk *neonisasi* dinyatakan sebagai bentuk yang tidak baku dari *peneonan*. Hal ini berarti bentuk *rayonisasi* berterima sedangkan *neonisasi* tidak berterima. Ketidakkonsistenan ini seharusnya diterangkan dalam buku tersebut dengan berdasar pada keterangan dari KBBI V sebagai kaidah primer. Jadi, bentuk-bentuk dalam barisan di atas tidak serta-merta secara implisit dianggap sebagai bentuk yang salah dalam bahasa Indonesia.

3. Sisipan *-in-* dalam bahasa Indonesia

Pada penjelasan sisipan di halaman 34, buku ini menyatakan bahwa “jika kata sejenis *kinerja* dan *sinambung* dipandang sebagai kata yang bersisipan, berarti dalam bahasa Indonesia selain terdapat ketiga sisipan tersebut, juga terdapat sisipan *-in-*“. Pernyataan ini muncul sebagai penjelasan tambahan atas sisipan *-el-*, *-em-*, dan *-er-* dalam bahasa Indonesia. Karena bentuk pernyataannya adalah pernyataan persyaratan, vonis keliru terhadap pernyataan itu tidak bisa dilakukan. Namun, yang menjadi fokus persoalan di sini adalah sisipan *-in-* tidak diakui dalam KBBI V. Sisipan yang diakui adalah sisipan *-el-*, *-em-*, dan *-er-*.

Kata *kinerja* dan *sinambung* yang ada di dalam KBBI V merupakan kata dasar yang berdiri sendiri. Kedua kata ini pun bukan merupakan bentuk turunan dari kata dasar

kerja maupun *sambung*. Artinya, sangat jelas bahwa sisipan *-in-* bukan termasuk sisipan dalam bahasa Indonesia meskipun potensi untuk itu ada. Karena buku ini tidak secara eksplisit menyatakan bahwa *-in-* merupakan sisipan, tidak ada yang perlu dikritisi dalam konteks ini. Namun, di sisi yang lain, Buku Seri Penyuluhan Bahasa Indonesia: Tata Istilah secara eksplisit membenarkan bahwa sisipan *-in-* merupakan sisipan yang ada dalam bahasa Indonesia dengan contoh *sinambung*, *kinerja*, dan *tinambah* (hal. 42).

Dua di antara contoh tersebut telah final posisinya dalam KBBI V. Yang menarik perhatian adalah bentuk *tinambah*. Dalam KBBI V, bentuk *tinambah* merupakan salah satu bentuk turunan dari kata *tambah*. Makna *tambah* adalah 'yang ditambahkan pada yang sudah ada supaya menjadi lebih banyak (lebih besar dan sebagainya); imbuh; tokok' sedangkan makna *tinambah* adalah 'bilangan yang ditambahkan pada bilangan lain'. Kata *tinambah* tergolong ke dalam istilah di bidang Matematika. Dengan hadirnya *tinambah* sebagai bentuk turunan dari *tambah*, kemungkinan bahwa *tinambah* merupakan bentuk jadian dari kata *tambah* dan sisipan *-in-* berterima. Dengan demikian, hal ini menjadi bukti tambahan terkait inkonsistensi kaidah yang berlaku dalam pedoman yang ada.

4. Kata konkret dan kata abstrak

Kata konkret dan kata abstrak dibahas pada halaman 55 dengan dilengkapi definisi dan contoh dari masing-masing istilah teknis tersebut. Kata konkret didefinisikan sebagai kata yang maknanya dapat dibayangkan dengan pancaindra sedangkan kata abstrak didefinisikan sebaliknya, yakni kata yang maknanya tidak dapat dibayangkan maknanya dengan pancaindra. Contoh kata yang bermakna konkret adalah *mangga* dan contoh kata yang bermakna abstrak adalah *keadilan*. Yang menjadi persoalan pada uraian ini adalah variabel penjelasan yang berbunyi dapat dibayangkan dengan pancaindra.

Penjelasan ini tentu tidak logis karena tidak satu pun bagian pancaindra berfungsi membayangkan sesuatu. Dalam KBBI V, pancaindra bermakna 'alat perasa yang lima macam (yaitu penglihat, penghidu (pencium), pengecap (perasa lidah), perasa tubuh, dan pendengar'. Makna tersebut menyatakan bahwa fungsi pancaindra adalah alat perasa alias bukan alat pembayang. Di sisi yang lain, contoh kata konkret dan abstrak yang disebutkan dalam buku ini pada dasarnya bisa dibayangkan. Wujud/representasi objeknya yang mungkin berbeda-beda bagi setiap orang.

Dalam KBBI V, makna kata konkret adalah 'nyata; benar-benar ada (berwujud, dapat dilihat, diraba, dan sebagainya)' sedangkan makna kata abstrak adalah 'tidak berwujud; tidak berbentuk; mujarad; niskala'. Selayaknya, penjelasan kata konkret dan abstrak dalam buku tersebut mengikuti fitur makna yang ada di KBBI V. Hal ini cukup penting karena dalam diskusi, misalnya, mahasiswa selalu memperdebatkan persoalan dapat dibayangkannya kata konkret dan abstrak ini.

5. Pasangan *hanya* dan *saja* sebagai sinonim yang mubazir

Di halaman 61, didaftarkan pasangan kata yang bersinonim dan mubazir penggunaannya dalam sebuah konstruksi kalimat. Pasangan kata yang dimaksud yakni pasangan *sangat* dan *sekali*, *hanya* dan *saja*, *demi* dan *untuk*, *seperti* dan *misalnya*, *contohnya* dan *seperti*, *lalu* dan *kemudian*, serta *kalau* dan *seandainya*. Pasangan kata yang dinilai mubazir yang menarik disorot dalam konteks ini adalah pasangan *hanya* dan *saja*. Jika merujuk ke KBBI V, kata tersebut dibolehkan berpasangan dengan kata *saja* dengan maksud untuk mengeraskan makna.

Dalam KBBI V, kata *hanya* tergolong *adverbia* yang diberi makna ‘saja (biasanya digunakan bersama “saja” untuk mengeraskan makna)’. Contoh penggunaan kata ini dalam KBBI V terletak dalam kalimat *Hanya itu saja yang dapat kusumbangkan*. Meskipun ada pemagaran dengan pernyataan *biasanya* pada contoh yang diberikan oleh KBBI V, hal ini tetap dijadikan acuan. Dengan demikian, terdapat perbedaan atau inkonsistensi antara dua kaidah yang menjadi acuan penutur bahasa.

6. Penggunaan kata *syahdan*, *hulubalang*, *alkisah*, dan *hikayat* yang dinyatakan tidak relevan di masa sekarang

Pada pembahasan kelayakan temporal di halaman 87—88 dikatakan bahwa penggunaan kata bergantung pada zamannya. Artinya, ada beberapa kata yang layak digunakan pada zaman tertentu dan tidak layak digunakan pada zaman lainnya. Zaman yang diterangkan dalam buku ini misalnya zaman awal abad ke-21, orde lama, dan orde baru. Masing-masing zaman itu memiliki kata-kata tertentu yang unik.

Selanjutnya, pada contoh kata di penjelasan zaman awal abad ke-21: *syahdan*, *hulubalang*, *alkisah*, dan *hikayat* diberikan keterangan penjelasan bahwa kata-kata tersebut tidak relevan lagi jika digunakan pada masa-masa sekarang. Karena hidup di zaman awal abad ke-21, penggunaan kata-kata itu seharusnya digunakan pada zaman tersebut. Pada orde reformasi sekarang ini misalnya, kata-kata tersebut tidak layak digunakan. Penjelasan semacam ini seharusnya dihindari karena bersifat membatasi penggunaan kata dalam bahasa Indonesia.

Dalam KBBI V, kata-kata tersebut tergolong ke dalam kata baku bahasa Indonesia. Pada kenyataannya pun, kata-kata ini masih digunakan dalam beberapa kesempatan di zaman kini. Jangankan kata yang statusnya baku dalam KBBI V, bentuk tulisan dengan ejaan lama pun masih digunakan dan dianggap unik karena bukan pada zamannya. Oleh karena itu, pembatasan semacam itu tidak perlu dilakukan.

7. Perbedaan kata *adalah* dan *ialah*

Dalam buku ini, kata *adalah* dibedakan penggunaannya dengan kata *ialah* (hal. 99). Kata *adalah* digunakan untuk menjelaskan sesuatu sedangkan kata *ialah* digunakan untuk mendefinisikan sesuatu. Perbedaan penggunaan seperti ini bertentangan dengan pengertian *adalah* dan *ialah* yang ada di KBBI V. Pada KBBI V, kata *adalah* memiliki tiga makna, yakni (1) ‘identik dengan’, (2) ‘sama maknanya dengan’, dan (3) ‘termasuk dalam kelompok atau golongan’. Sementara itu, makna *ialah* adalah ‘penghubung di antara dua penggal kalimat yang menegaskan perincian atau penjelasan atas penggal pertama itu’.

Sampai di sini, perbedaan antara *adalah* dan *ialah* hanya pada konsep menjelaskan dan mendefinisikan kurang dapat diterima karena penggunaan kata tersebut di dalam KBBI V sudah jelas. Secara umum, fitur menjelaskan dan mendefinisikan pada kedua kata tersebut ada. Namun, secara khusus, kedua kata tersebut memiliki fungsi atau penggunaan tersendiri. Kata *ialah* mencakup fitur makna menjelaskan sekaligus mendefinisikan sesuatu sedangkan kata *ialah* lebih khusus untuk menegaskan pokok persoalan yang ada di bagian sebelah kiri kata tersebut. Sebagai contoh, dalam KBBI V, contoh penggunaan *ialah* seperti pada kalimat: *Yang perlu dikerjakan sekarang ialah membawa korban ke rumah sakit*. Penggunaan *ialah* dalam konteks ini hampir sama dengan penggunaan *yaitu* atau *yakni*.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, inkonsistensi atau ketidakserasian antarkaidah dalam bahasa Indonesia ternyata masih ditemukan. Padahal, semua kaidah yang berlaku selayaknya harus saling mengonfirmasi. Hal ini sangat penting agar penggunaan bahasa Indonesia yang benar di masyarakat dapat dijaga dan diteruskan. Karena setiap persoalan kebahasaan membutuhkan keterangan penjelasan berdasarkan kaidah, kaidah yang berlaku haruslah mendekati paripurna. Setidaknya, sumber-sumber yang berisi kaidah tidak boleh bertentangan satu sama lain.

PENUTUP

Berbagai bukti inkonsistensi yang dipaparkan dalam penelitian ini lebih banyak ditemukan karena ketidakselarasan. Ketidakselarasan itu seperti adanya data dan substansi objek penelitian yang tidak mengikuti perkembangan kaidah terbaru yang berlaku. Hal ini cukup wajar karena tahun publikasi objek penelitian lebih lama dibandingkan dengan kaidah terbaru yang sedang berlaku itu. Meskipun demikian, hal tersebut haruslah menjadi fokus perhatian pemangku kepentingan untuk mengevaluasi dan memperbarui data dan substansi buku yang menjadi objek penelitian ini. Inkonsistensi kaidah dalam berbagai sumber acuan bahasa Indonesia itu tidak boleh terjadi mengingat semua buku acuan yang ada dengan terbitan tahun mana pun masih tetap berlaku.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai lembaga yang bertugas menjaga martabat bahasa Indonesia wajib memastikan hal-hal yang berhubungan dengan vitalitas bahasa Indonesia. Salah satu yang harus dijaga adalah pedoman-pedoman dan acuan yang menyangkut standar berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Penelitian ini telah membuka beberapa bukti inkonsistensi pedoman dan acuan itu. Pada akhirnya, perhatian dari pemangku kebijakan sangat diharapkan. Harapan itu adalah menerima masukan dan menindaklanjuti persoalan-persoalan yang diuraikan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaer, A. (2012). *Seputar Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dawud. (2015). *Prosedur Analisis Kesalahan Berbahasa*. *Diksi*. <https://doi.org/10.21831/diksi.v15i1.6559>
- Furchan, A. (2004). *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, A. (2007). *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. In *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*.
- Herawati, L., & Mulyaningsih, I. (2019). *Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Surat Resmi di Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon*. *Indonesian Language Education and Literature*. <https://doi.org/10.24235/ileal.v5i1.5239>
- KBBI. (2019). *KBBI - Kamus Besar Bahasa Indonesia*. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Keshavarz, M. (2012). *Contrastive analysis and error analysis* (2nd ed.). Tehran: Rahamana Press.
- Mahsun, M. (2014). *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan, Strategi, dan Tekniknya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mustakim (2014). *Seri Penyuluhan Bahasa Indonesia: Bentuk dan Pilihan Kata*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pemasarakatan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- PUEBI. (2016). Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. In *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*. <https://doi.org/10.5851/kosfa.2016.36.6.807>
- Putri Wulan Dhari. (2020). Analisis Kesalahan Berbahasa dalam Artikel Ilmiah Dosen STAIN Gajah Putih Takengon. *Jurnal As-Salam*. <https://doi.org/10.37249/as-salam.v4i1.169>
- Rahmawati, L. E., Kartikasari, F., & Sukoco, Y. W. T. (2015). Analisis Kesalahan Berbahasa pada 20 Paket Soal Ujian Nasional Bahasa Indonesia SMP 2012/2013. *Jurnal VARIDIKA*. <https://doi.org/10.23917/varidika.v26i2.682>
- RI, U. (2009). UU RI No 24 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. *UU RI NO 24 2009*.
- Sasangka, S.S.T.W. (2014). *Seri Penyuluhan Bahasa Indonesia: Kalimat*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Suandi, I. N. (2015). Analisis Pemakaian Bahasa Indonesia pada Laporan Penelitian Dosen di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha. *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia)*. <https://doi.org/10.23887/jpi-undiksha.v3i2.4460>
- Sriyanto (2014). *Seri Penyuluhan Bahasa Indonesia: Ejaan*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Suwandi, S. (2008). *Serbalinguistik: Mengupas pelbagai praktik berbahasa*. Surakarta: Kerja sama Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press), Universitas Sebelas Maret.
- Qodratillah, M.T. (2016). *Seri Penyuluhan Bahasa Indonesia: Tata Istilah*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Willems et all. (2003). *Contrastive Analysis in Language : Identifying Linguistic Units of Comparison*. New York: Palgrave Macmillan.